



JURNAL ILMIAH HUKUM DE'JURE KAJIAN ILMIAH HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

JIH ~ DE'JURE	Vol. 2	No. 2	Halaman 202-386	September 2017	ISSN: 2541-1594
---------------	--------	-------	-----------------	----------------	-----------------

- 0 **PERANAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN**
Andrie Irawan
- 0 **IMPLEMENTASI PERDAMAIAN (ACCORD) PADA PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA**
Anita Afriana dan Rai Mantili
- 0 **ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PASAR MALAM DAN DINAMIKANYA DI KOTA SAMARINDA**
Fatimah Asyari
- 0 **ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLITIK HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN: DESENTRALISASI ATAU RE-SENTRALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**
Holyness N. Singadimedjai
- 0 **TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP EFEKTIVITAS INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
Ina Heliany
- 0 **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (ANJAL) DI KOTA SAMARINDA**
Isnawati
- 0 **PENERAPAN REKONVENSASI SEBAGAI HAK ISTIMEWA TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN (TALAK) DI PENGADILAN AGAMA**
Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati
- 0 **RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN MATI ATAU LUKA BERAT SEBAGAI SYARAT PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN DI POLRES KARAWANG**
Oci Senjaya
- 0 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN DI INDONESIA**
Rani Apriani
- 0 **RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**
Sherly Ayuna Putri



JURNAL ILMIAH HUKUM DE'JURE KAJIAN ILMIAH HUKUM

Susunan Redaksi (Board of Editors)

Penanggung jawab (Head of Advisor)	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Mitra Bestari (Peer Reviewer)	:	Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H Dr. Bambang Daru, S.H., M.H Dr. Hernadi, S.H., LL.M
Pemimpin Redaksi (Editor in Chief)	:	Rahmi Zubaedah, S.H., M.H
Dewan Editor (Editorial Board)		
Manajer Editor (Managing Editor)	:	Pamungkas SP., S.H., M.H M. Holyone Nurdin Singadimedja, S.H., M.H
Manajer Keuangan (Manager in Finance)	:	Siti Hamimah, S.H., M.H Azis Hidayat Imam Nurzaman
Manajer Pemasaran (Manager in Marketing)	:	Mansyur Anden
Editor Bahasa Indonesia (Editor in Indonesia Language)	:	Slamet, S.Pd., M.Pd
Editor Bahasa Inggris (Editor in English Language)	:	Dini, S.Pd., M.Pd
Editor Tata Letak & Sampul (Layout & Cover)	:	Ahmad Mubarak, S.Ds., M.M Ilham Fitrahriansyah Muhammad Mahfud
Penerbit (Publisher)	:	Lembaga Kajian Hukum (LKH) Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Alamat (Address) Redaksi:

REDAKSI JURNAL ILMIAH HUKUM DE'JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM

J I H ~ DE'JURE ~ K I H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang

Telp. (0267) 640759; Faks. (0267) 640759

Website: www.fh.unsika.ac.id

Email: jurnaldejurefhunsika@gmail.com

Jurnal ini dapat diunduh pada menu e-jurnal pada laman <http://journal.unsika.ac.id/>



**JURNAL ILMIAH HUKUM
DE'JURE
KAJIAN ILMIAH HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

Volume 2 Nomor 2

ISSN: 2541-1594

September 2017

J I H ~ DE'JURE merupakan Jurnal Ilmiah Hukum yang memuat naskah di bidang ilmu hukum serta analisis dan peran serta akademisi, praktisi dan masyarakat dalam merepresentasikan kebebasan berpendapat dan pembahasan soal isu-isu di bidang hukum.

J I H ~ DE'JURE merupakan media publikasi ilmiah yang terbit sebanyak dua nomor dalam satu tahun (Mei dan September).

**Setiap substansi Jurnal dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(Citation is permitted with acknowledgement of the source)**

**Segala pendapat yang dimuat dalam Jurnal
ini tidak mewakili pendapat resmi dari
Fakultas Hukum Universitas
Singaperbangsa Karawang**



J I H ~ DE'JURE ~ K I H Redaksi

Sidang Pembaca yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa

Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, konseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta analisis hal-hal lainnya di bidang ilmu hukum yang tidak dapat terlepas sebagai ilmu pengetahuan. Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” merupakan hasil penelitian berupa tulisan baik dari kalangan civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang pada umumnya maupun hasil sumbangsi Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa/i, masyarakat, para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum.

Jurnal Ilmiah Hukum “De’Jure” telah memiliki *International Standard Serial Number-ISSN* (Nomor Seri Standar Internasional) sebagai sebuah nomor khusus yang sering digunakan untuk mengidentifikasi setiap publikasi berkala dan diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0005.115/JL.3.2/SK.ISSN/2015.03. Volume ini diyakini dapat memberikan sentuhan dan warna baru di dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Indonesia. Harapan Tim Redaksi yaitu dapat memberikan sumbangsi pemikiran/gagasan pada pembaharuan Hukum Indonesia dan setidaknya-tidaknya memberikan secerca sinar terang dalam hutan belantara nan gelap sebagai ungkapan terhadap pengaturan dan penerapan Hukum Indonesia dengan keyakinan Indonesia akan menjadi lebih bermartabat berdasarkan Pancasila.

Terdapat sekitar sepuluh (10) naskah yang mengkaji dan menganalisis tentang dinamika ilmu hukum dan penerapannya yang diawali oleh Andrie Irawan yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan” Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bermaksud menguraikan/menggambarkan analisis pengaturan yang ada. Fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas termasuk anak perempuan penyandang disabilitas menjadi permasalahan sosial yang dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selain itu juga menjadi permasalahan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kedua, terdapat tulisan dari Anita Afriana dan Rai Mantili yang berjudul “Implementasi Perdamaian (*Accord*) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia” di mana artikel ini dikhususkan pada perdamaian setelah putusan pernyataan pailit, yaitu akan meneliti mengenai implementasi perdamaian di Pengadilan Niaga Jakarta dan meneliti faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi para pihak untuk

melaksanakan perdamaian. Ketiga, tulisan dari Fatimah Asyari ikut serta dalam memberikan kontribusi melalui tulisan yang berjudul berjudul "Analisis Yuridis Pengelolaan Pasar Malam dan Dinamikanya di Kota Samarinda". Tulisan tersebut menekankan bahwa terbentuknya Peraturan Daerah akan menciptakan pengelolaan Pasar Malam Rekreasional dan menjadi salah satu tujuan wisata kerakyatan di Kota Samarinda dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar Malam menjadi salah satu tambahan objek pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berbasis Ekonomi Pancasila di Kota Samarinda dapat tercapai dengan lebih maksimal. Keempat, Holyness N. Singadimedja yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Politik Hukum Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan: Desentralisasi atau Re-Sentralisasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" di mana mempersoalkan tentang pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak menjadi pembicaraan di kalangan Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia.

Kelima, Ina Heliany yang berjudul "Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" yang menegaskan bahwa fenomena meningkatnya perilaku kenakalan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Apabila diamati ternyata banyak sekali hak anak yang terlanggar dari proses pemeriksaan sampai pada putusan hakim dan masih dijumpai bahwa ternyata hakim cenderung menjatuhkan pidana badan dan perampasan kemerdekaan dalam memutuskan perkara anak. Keenam, Isnawati dengan tulisan yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Dalam Penertiban Anak Jalanan (Anjal) di Kota Samarinda" memberikan pendapat bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda di mana Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 harus dirubah dan dikaji ulang secara materiil karena tidak sesuai dengan pola hidup masyarakat Kota Samarinda saat ini dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Keberadaan anak jalanan sebagai suatu permasalahan perkotaan perlu untuk mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, terutama bagi instansi/dinas pemerintahan yang terkait dalam pengambilan kebijakan mengenai anak jalanan. Ketujuh, Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati yang berjudul "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama" memberikan pandangan bahwa pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara *contradictoir* disertai gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban. Rekonvensi berkaitan dengan gugatan nafkah akibat talak yaitu nafkah iddah, mut'ah, kishwah, maskan, hak asuh anak (hadhanah) serta biaya hadhanah, yang antara gugatan konvensi dengan rekonvensi memiliki koneksitas erat. Sikap hakim

Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai (talak) dengan gugatan rekonsvansi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi.

Kedelapan, Oci Senjaya memberikan kontribusi tulisan yang berjudul "Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan di Polres Karawang" dengan menganalisis tentang korban dan pembuat tindak pidana pada tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat. Restitusi dan kompensasi yang pada kelahirannya merupakan hak korban dan keluarganya, kemudian diambil alih oleh Negara kepada korban atau keluarganya, karena restitusi dan kompensasi sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban terutama yang ekonominya lemah. Pihak kepolisian dalam hal ini Polres Karawang disarankan harus aktif di dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Hak Atas Restitusi dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian agar masyarakat paham mengenai perundang-undangan yang berlaku. Kesembilan yaitu Rani Apriani yang memberikan kontribusi melalui tulisan yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia" menegaskan bahwa terkait dengan adanya hak bagi nasabah untuk mengajukan segala hal yang merugikannya kepada Lembaga Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, pihak bank perlu dalam hal ini Bank Indonesia mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut dan bagi bank-bank komersial perlu memberikan penjelasan mengenai hak-hak nasabah dan jika perlu mencantumkan *agreement to mediate* di dalam perjanjian kredit/pembiayaan serta pada rekening simpanan nasabah. Tulisan kesepuluh ada tulisan dari Sherly Ayuna Putri yang berjudul "Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" di mana mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Tim Redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang merupakan kelemahan tersendiri baik dari segi desain cetak, substansi dan hal-hal lainnya. Untuk itu Tim Redaksi memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Demi penyempurnaan pada edisi-edisi selanjutnya, tim berharap dengan segala hormat, menerima saran dan pendapat serta kritikan dari para pembaca yang budiman.

Akhir kata Tim Redaksi berharap semoga kehadiran Jurnal edisi ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan para Pembaca mengenai dinamika pengaturan dan penerapan hukum di Indonesia dan juga bermanfaat dalam upaya membangun budaya sadar hukum. Semoga penjelasan pada setiap kalimat dan halaman dapat bermanfaat serta wujud pengembangan diri para penulis untuk mengimplementasikan Tri Dharma

Perguruan Tinggi dan mewarnai ide dan saran membangun Hukum Indonesia. Dalam kesempatan ini Tim Redaksi memberikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Civitas Akademika Universitas Singaperbangsa Karawang, Para Penulis, Para Mitra Bestari yang sudah meluangkan waktunya dalam kesibukannya yang padat. Semoga Tuhan selalu merahmati Alam Semesta ini beserta isinya.

Selamat membaca!

Tim Redaksi
Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi <i>JIH ~ De'Jure ~ KIH</i>	iv-vii
PERANAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN KEKERASAN	
<i>Andrie Irawan</i>	202-218
IMPLEMENTASI PERDAMAIAAN (<i>ACCORD</i>) PADA PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA	
<i>Anita Afriana dan Rai Mantili</i>	219-233
ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN PASAR MALAM DAN DINAMIKANYA DI KOTA SAMARINDA	
<i>Fatimah Asyari</i>	234-247
ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLITIK HUKUM KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN: DESENTRALISASI ATAU RESENTRALISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	
<i>Holyness N. Singadimedja</i>	248-263
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP EFEKTIVITAS INDIVIDUALISASI PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	
<i>Ina Heliany</i>	264-283
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (<i>ANJAL</i>) DI KOTA SAMARINDA	
<i>Isnawati</i>	284-298
PENERAPAN REKONVENSII SEBAGAI HAK ISTIMEWA TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN (<i>TALAK</i>) DI PENGADILAN AGAMA	
<i>Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati</i>	299-315
RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN MATI ATAU LUKA BERAT SEBAGAI SYARAT PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN DI POLRES KARAWANG	
<i>Oci Senjaya</i>	316-340
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN DI INDONESIA	
<i>Rani Apriani</i>	341-359
RISIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
<i>Sherly Ayuna Putri</i>	360-375
Biodata Penulis	376-377
Pedoman Penulisan	378-385
Formulir Berlangganan	386



JIH ~ DE'JURE ~ KIH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
menyampaikan terima kasih

Kepada Para
Mitra Bestari/Penilai (*referee*)
Volume 2 Nomor 2 September 2017

Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.

Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.

Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M. M.H.

Dr. Bambang Daru, S.H., M.H.

Dr. Hernadi, S.H., LL.M.